

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

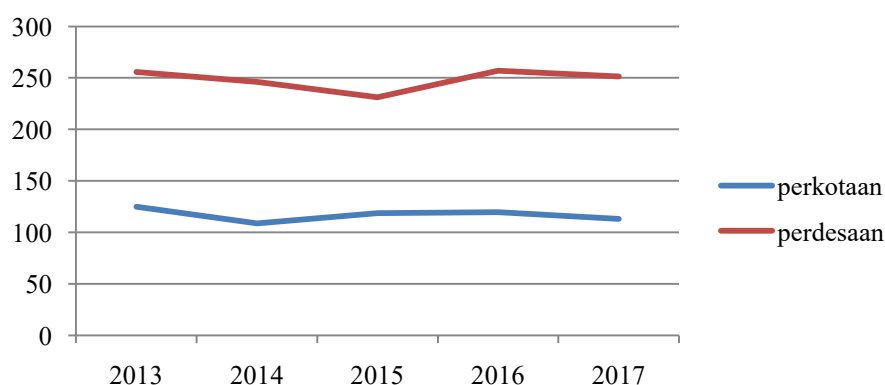
Negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia, persoalan pembangunan masih berkuat pada persoalan dasar, yaitu tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta kesenjangan yang masih tinggi. Berdasarkan data BPS tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2017 adalah 5,07%, merupakan pertumbuhan tertinggi dari tahun 2014. Namun tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak secara langsung dapat menjawab persoalan pembangunan yang sedang dihadapi Indonesia. Dampak pembangunan melalui strategi pembangunan yang diambil selama ini masih dinikmati oleh sebagian rakyat Indonesia, terutama masyarakat kelas menengah keatas di daerah perkotaan, yang mengakibatkan semakin lebarnya ketimpangan di Indonesia. Todaro dan Smith (2012) telah mengungkapkan hal tersebut mencerminkan distribusi pendapatan terlihat timpang pada masyarakat.

Pasca era reformasi perencanaan pembangunan Indonesia difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Masa ini dilanjutkan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pelimpahan pemerintah pusat atas wewenang dan kekuasaan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah, organisasi semi otonom atau organisasi non pemerintah (Rondinelli *et al*, 1983). Sebagaimana laporan Bank Dunia, otonomi daerah telah diaplikasikan oleh 95% negara anggota PBB. Dimana metode ini dianggap sebagai obat mujarab dalam mengatasi penyakit pemerintah dan dijadikan sebagai syarat demokrasi.

Isu kesenjangan antar wilayah telah menjadi salah satu permasalahan dalam setiap masa perencanaan pembangunan. Ketidakmerataan kebijakan juga menjadi penyebab suatu kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Dimana terkadang pertumbuhan ekonomi yang baik tidak menjadi penjamin kesenjangan dapat teratasi, namun sering kali yang terjadi adalah sebaliknya. Menurut

Sjafrizal (2016) dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan masing-masing daerah, dibutuhkan integritas, sinergitas dan sinkronisasi masing-masing pemegang kepentingan dalam mempercepat realisasi pembangunan dalam menumbuhkan ekonomi dan meminimalkan kesenjangan.

Sumatera Barat juga ikut berbenah dan fokus membangun kondisi ekonominya guna ikut dalam pembangunan bangsa. Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan Sumatera Barat dari tahun 2013 hingga 2018 angka kemiskinannya terbilang rendah jika dilihat dari rata-rata nasional. Angka kemiskinan perdesaan terlihat selalu lebih tinggi dari perkotaan. Dimana pada September 2018 jumlah penduduk miskin perdesaan 245,41 ribu jiwa atau 7,98% dan perkotaan 125,58 ribu jiwa atau 5,11% (BPS, 2019), walaupun untuk pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan selalu lebih tinggi dari perdesaan.



Sumber : BPS, (2018).

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan se Sumatera Barat periode September tahun 2013-2017 (dalam ribu jiwa)

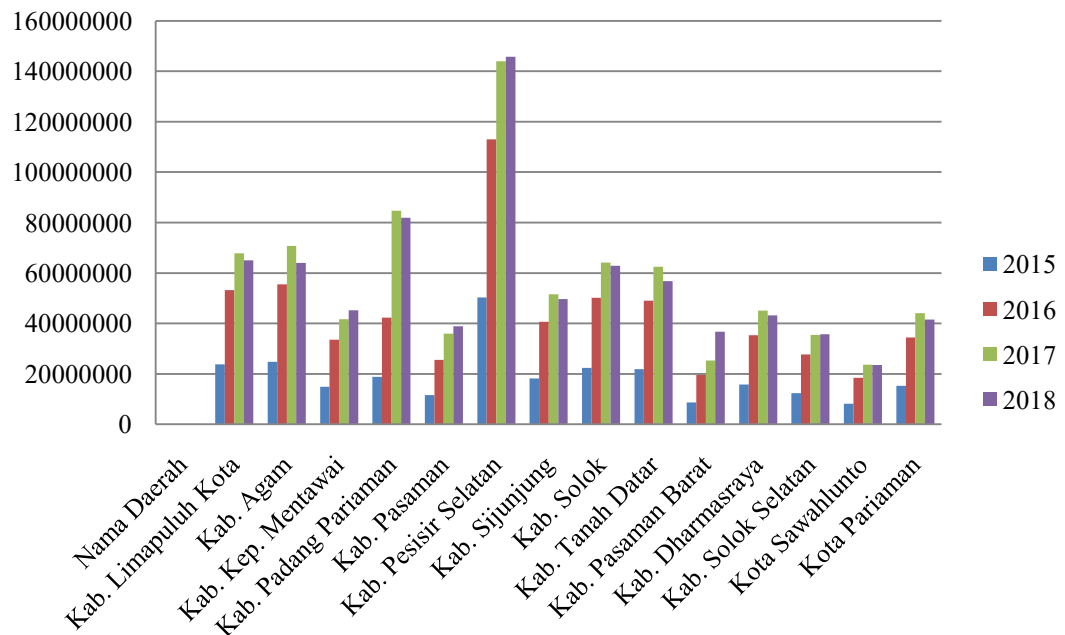
Saat ini pembangunan perdesaan telah menjadi tujuan pembangunan Indonesia. Pembangunan berbasis perdesaan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan dasar terhadap masyarakat, menurunkan kemiskinan dan memperkecil ketimpangan. Untuk mendukung pembangunan perdesaan tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Hal ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan telah terealisasi sejak tahun 2015.

Penggunaan dana desa tersebut diupayakan melalui kegiatan padat karya (*labor intensive*) guna dapat menyerap tenaga kerja perdesaan yang lebih maksimal. Dana desa tersebut juga digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif serta dalam pengembangan potensi usaha perekonomian lokal. Selain itu penggunaan bahan lokal juga menjadi prioritas, untuk meningkatkan produksi lokal dan meningkatkan upah buruh lokal.

Disisi lain, pemerintah juga secara bertahap telah menambah pengeluaran belanja pada tiap-tiap daerah. Pengeluaran pemerintah tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, yang diharapkan dapat berfungsi dalam menyediakan untuk masyarakatnya pelayanan umum yang secara ekonomis menurut Mankiw (2016) sulit dinilai. Dibeberapa penelitian disebutkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan komponen kebijakan fiskal yang dapat memelihara kestabilan ekonomi, mendorong laju investasi, menciptakan lapangan-lapangan kerja, dan pemerataan distribusi pendapatan yang bermuara pada penurunan kemiskinan (Oriavwote dan Ukawe, 2018; Amalia, 2015; Antwi, 2013; Guiga dan Ben Rejeb, 2012; Mehmood dan Sadiq, 2010).

Seperti halnya pengeluaran pemerintah lainnya, untuk tiap tahun anggaran dana desa juga mengalami peningkatan. Peningkatan pengalokasian dana desa diatas tidak secara langsung mendongkrak penurunan angka kemiskinan di daerah penerima dana desa di Sumatera Barat. Sedangkan kondisi kemiskinan menurut Nurkse (1953) dapat dipecahkan dengan memberikan stimulus dengan strategi dorongan besar dalam pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dorongan besar dimaksud berupa investasi besar, salah satunya berasal dari pengeluaran pemerintah.



Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2018 (diolah).

Gambar 2. Jumlah Dana Desa Per Kabupaten Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2018 (dalam ribu rupiah)

Begitupula jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya tidak juga terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak menerima dana desa. PDRB kota pada umumnya lebih tinggi dari PDRB kabupaten. Dengan kondisi tersebut menunjukkan masyarakat kota lebih sejahtera dari masyarakat di Kabupaten. Pengalokasi dana desa ini masih dianggap banyak pihak belum sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut menurut Lewis (2015) terjadi karena formula pengalokasian dana desa saat ini masih kurang tepat, karena melihat heterogenitas antar wilayah perdesaan di Indonesia saat ini masih sangat signifikan.

Regulasi mengamankan dana desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhitungkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah begitupula tingkat kesulitan geografis. Secara garis besar tujuan kebijakan dana desa tersebut adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan memperkecil kesenjangan antar

wilayah. Dalam hal ini Daforsa dan Handra (2019) telah membuktikan adanya dampak dana desa dalam usaha mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pasaman. Dampak dana desa tersebut tidak terlalu besar karena masih dilakukan dalam tiga tahun, serta perlu ada keseimbangan anggaran pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan masyarakat Sumatera Barat mayoritas hanya menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama sebesar 65,98%, sedangkan yang mampu menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 8,53% (BPS, 2019). Faktor ini mempengaruhi angkatan kerja dan tingkat pengangguran, dimana jumlah pengangguran terbesar merupakan tamatan sekolah lanjutan atas. Sehingga banyak pengeluaran pemerintah Sumatera Barat dialokasikan untuk bidang pendidikan, yang di beberapa penelitian signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kemiskinan. Jika dilihat antara kabupaten dan kota, rata-rata tingkat pengangguran kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Namun PDRB perkapita kota secara umum lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten.

Kondisi perdesaan yang masih tertinggal tersebut mengharuskan pemerintah mencoba membangun Indonesia mulai dari pinggiran, dengan mengurangi kemiskinan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada penelitian terdahulu, juga menunjukkan hasil bahwa program dana desa berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan dan perekonomian masyarakat (Tangkumahat, 2017). Begitu pula Fan, Hazell dan Thorat (2000) mengemukakan bahwa belanja pemerintah pada pembangunan perdesaan sangat efektif menanggulangi kemiskinan pada jangka pendek, terutama belanja dibidang infrastruktur, pengairan, pertanian dan program pembangunan perdesaan.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang masalah penelitian, maka terdapat beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Apakah dana desa memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
- b. Apakah dana desa memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka akan diperoleh tujuan penelitian, yaitu :

- a. Menganalisis dampak dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menganalisis dampak dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat berupa :

- a. Memberikan gambaran kepada pembaca tentang dampak dan manfaat dana desa di Provinsi Sumatera Barat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi dan memberikan masukan serta informasi kepada pengambil kebijakan, guna meningkatkan pengelolaan dana desa dalam mencapai tujuannya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan analisis pada penelitian ini dilakukan pada tingkat Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang memiliki desa (Nagari) sebagai penerima dana desa. Daerah penerima dana desa tersebut terdiri atas 12 kabupaten dan 2 kota. Periode penelitian dilakukan sejak dana desa dikucurkan yaitu 2015 hingga 2018.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan terstruktur yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI,

terdiri dari teori pertumbuhan ekonomi, teori pengeluaran pemerintah, konsep dan teori kemiskinan, keuangan desa dan dana desa, pembangunan perdesaan, penelitian terdahulu, serta pemilihan variabel penelitian dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN,

terdiri dari daerah penelitian, jenis, sumber dan metode pengumpulan data, metode analisis dan defenisi operasional variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN,

terdiri dari kondisi umum Provinsi Sumatera Barat dan kondisi perdesaan di Provinsi Sumatera Barat.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN,

menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi tujuan penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN,

terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran.

